

Prospect Analysis of the Collaboration of "Kalimasada" and "MBKM-A" Programs as Population Administration Service Innovations in the City of Surabaya

Analisis Prospek Kolaborasi Program “Kalimasada” dan “MBKM-A” Sebagai Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kota Surabaya

Eny Haryati

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

Abstract. As a metropolitan city, Surabaya has a population of 2,971,300 people, consisting of 1,474,330 people (49.62%) men and 1,496,970 people (50.38%) women. This number causes the complexity of population administration service problems (Adminduk). The crucial problem is the discrepancy between *de facto* data and *de jure* data, caused by the high mobility of changes in population data due to births, deaths, in-migration and out-migration. The Adminduk Awareness Community Environmental Area Program (abbreviated: Kalimasada) is here to solve this problem. This study aims to: (1) determine the public's response to the Kalimasada program; (2) knowing the contribution of the Kalimasada program to data updating; (3) knowing the benefits received by universities in implementing the Independent Learning Campus Merdeka (MBKM). The method used in this research is: systematic review with a qualitative approach, namely Meta-Ethnography. Systematic review is used to identify, evaluate and interpret all research results that are relevant to the research objectives. The results of this study indicate that the collaboration between the Kalimasada and MBKM-A programs has very good prospects, which is corroborated by the data: (1) the public gave a positive response to this program (community, head of RT, village apparatus, sub-district head); (2) in each RT, there is an increase in updating population data; (3) Universities that are willing to collaborate are always increasing, and state that this program is very helpful in achieving the effectiveness of the MBKM program on their campus.

Keywords: Collaboration, Merdeka Learning Merdeka Campus, Population Administration, Kalimasada.

Abstrak. Sebagai kota metropolitan, Surabaya memiliki penduduk 2,971,300 jiwa, terdiri 1,474,330 jiwa (49.62%) laki-laki dan 1,496,970 jiwa (50,38%) perempuan. Jumlah ini menyebabkan kompleksnya masalah pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk). Masalah krusialnya adalah terjadinya perbedaan antara data *de facto* dan data *de jure*, disebabkan oleh tingginya mobilitas perubahan data kependudukan akibat kelahiran, kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar. Program Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk (disingkat : Kalimasada) hadir untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui respon publik terhadap program Kalimasada; (2) mengetahui kontribusi program Kalimasada terhadap pembaharuan data; (3) mengetahui manfaat yang diterima Perguruan Tinggi dalam implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : *systematic review* dengan pendekatan kualitatif yakni Meta-Ethnography. *Systematic review* digunakan untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan interpretasi terhadap semua hasil penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi program Kalimasada dan MBKM-A memiliki prospek yang amat baik, yang dikuatkan oleh data: (1) publik memberikan respon positif terhadap program ini (masyarakat, Ketua RT, Aparatur Kelurahan, camat); (2) pada tiap-tiap RT, terjadi peningkatan pembaharuan data kependudukan; (3) Perguruan Tinggi yang bersedia menjalin berkolaborasi selalu bertambah, dan menyatakan bahwa program ini amat membantu mencapai efektifitas program MBKM di kampus mereka.

Kata kunci: Kolaborasi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Administrasi Kependudukan, Kalimasada.

1 Pendahuluan

Masalah krusial yang dihadapi negara-negara di dunia dewasa ini diantaranya adalah pesatnya pertumbuhan penduduk di perkotaan, bukan saja karena tingkat kelahiran di wilayah perkotaan yang relatif tinggi, tetapi juga karena tingkat urbanisasi yang meningkat secara terus-menerus. Pada skala global, ada kecenderungan masyarakat di berbagai belahan dunia lebih memilih tinggal di wilayah perkotaan; ini terbukti dengan data yang menunjukkan bahwa 54 persen populasi dunia bertempat tinggal di perkotaan pada tahun 2014; pada hal tahun 1950, baru 30 persen saja penduduk dunia yang bertempat tinggal di perkotaan; diperkirakan pada tahun 2050 nanti akan ada sekitar 66 persen populasi dunia yang bertempat tinggal di wilayah perkotaan,[1]. Jadi penduduk yang bertempat tinggal di perkotaan jumlahnya lebih besar dari pada jumlah penduduk yang bertempat tinggal di perdesaan, meskipun secara spasial jumlah luas wilayah perkotaan jauh lebih kecil daripada jumlah luas wilayah perdesaan.

Di Provinsi Jawa Timur, persentase jumlah penduduk yang bertempat tinggal di perkotaan meningkat dari 47,6 pada tahun 2010, menjadi 51,1 persen dan 54,7 persen di tahun 2015. Sementara itu jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur pada bulan September 2020 menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 40,67 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk periode 2010-2020 sebesar 0,79 persen per tahun, meningkat dibandingkan periode 2000-2010 yang sebesar 0,76 persen,[2].

Tabel 1 : Banyaknya Penduduk Kota Surabaya Menurut Jenis Kelamin 2011-2020

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2011	1,517,341	1,506,978	3,024,319
2012	1,566,072	1,559,504	3,125,576
2013	1,602,875	1,597,579	3,200,454
2014	1,430,985	1,422,676	2,853,661
2015	1,473,640	1,469,888	2,943,528
2016	1,507,474	1,509,179	3,016,653
2017	1,534,438	1,540,445	3,074,883
2018	1,541,738	1,552,994	3,094,732
2019	1,570,539	1,588,404	3,158,943
2020	1,474,330	1,496,970	2,971,300

Sumber : Dispendukcakil Kota Surabaya, diinput pada Badan Pusat Statistik tanggal 13 Desember 2021, [3].

Kota Surabaya jumlah penduduknya terus mengalami naik-turun (perubahan) dari waktu ke waktu. Berdasar data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcakil) yang diperbarui sampai dengan 13 Desember 2021 sebagaimana terdapat pada Tabel 1, penduduk Kota Surabaya tahun 2020 berjumlah 2,971,300 jiwa, terdiri 1,474,330 jiwa (49.62%) laki-laki dan 1,496,970 jiwa (50,38%) perempuan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur yang mencapai 40,67 juta jiwa pada tahun 2020, maka proporsi penduduk Kota Surabaya mencapai 7,30%. Ini merupakan proporsi yang amat tinggi, sebab jika diambil rata-rata dari total penduduk Provinsi Jawa Timur, maka per kabupaten/kota jumlah penduduknya adalah 1,07 juta jiwa (catatan: di Provinsi Jawa Timur terdapat 38 kabupaten/kota).

Disamping itu kondisi penduduk di perkotaan mengalami perubahan (naik-turun) yang unik dan amat dinamis. Banyak faktor yang memicu perubahan tersebut; diantaranya adalah faktor kelahiran dan kematian, faktor urbanisasi atau penduduk pindah masuk dan pindah keluar. Perkembangan pesat pembangunan (dalam segala bidang) yang terjadi di Kota Surabaya, rupanya telah memicu terjadinya urbanisasi. Banyak warga luar kota datang untuk bekerja di Kota Surabaya, yang pada akhirnya mereka menjadi penduduk tetap; meskipun juga terjadi hal yang sebaliknya, yaitu ada pula warga yang sebelumnya ber-KTP Surabaya lalu pindah domisili ke luar Kota Surabaya,[4].

Jumlah penduduk yang relatif tinggi di perkotaan tentu memerlukan perhatian khusus, sekurang-kurangnya karena jumlah penduduk yang tinggi memerlukan perhatian yang lebih, dalam banyak hal, misalnya dalam hal pelayanan publik. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki peran sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada pasal 1 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”,[5]. Praktek pelayanan publik meliputi berbagai sektor, diantaranya adalah pelayanan

kependudukan. Seiring dengan kapasitasnya sebagai kota metropolitan, Kota Surabaya berusaha merancang sejumlah program inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Salah satu program yang pernah menyedot perhatian publik dan diakui amat membantu peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan adalah inovasi “program e-Lampid”, yang merupakan program administrasi kependudukan berbasis digital. Pelayanan e-Lampid merupakan layanan online untuk pengurusan akta kelahiran, akta kematian, pindah datang dan pindah keluar,[6].

Tujuan inovasi pelayanan kependudukan di Kota Surabaya, disamping berupaya meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan adalah juga bertujuan memotivasi masyarakat untuk sesegera mungkin mau melaporkan perubahan data kependudukan dalam keluarganya, agar Pemerintah Kota Surabaya, dalam hal ini Dispendukcapil dapat memiliki data yang akurat dan data yang relatif sama antara kondisi *de facto* dan kondisi *de jure*.

Persoalan yang diduga sedang terjadi adalah ada indikasi, masyarakat Kota Surabaya tidak selalu melakukan perubahan data kependudukannya, meskipun data kependudukan mereka telah mengalami perubahan; misalnya akibat ada anggota keluarga yang mengalami kematian, kelahiran, perpindahan tempat tinggal, dan sebagainya. Dalam konteks inilah dipandang perlu menciptakan inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang diberi nama “Kalimasada”, merupakan akronim dari: Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk. Inovasi ini diluncurkan dan mulai dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 2021, yang pelaksanaannya melibatkan sejumlah pihak, diantaranya melibatkan Perguruan Tinggi, melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Adminduk (MBKM-A). Penulis memandang perlu untuk melakukan analisis bagaimana prospek kolaborasi antara Pemerintah Daerah (Dispendukcapil) Kota Surabaya dengan sejumlah Perguruan Tinggi dalam kerangka implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sesuai dengan latar belakang yang demikian inilah maka kami lakukan penelitian dengan tema : Analisis Prospek Kolaborasi Program “Kalimasada“ dan “MBKM-A“ Sebagai Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kota Surabaya.

Fokus analisis penelitian ini mengacu pada rumuskan permasalahan penelitian (*research questions*) sebagai berikut : Bagaimana prospek kolaborasi Program “Kalimasada“ dan “MBKM-A“ ditinjau dari: (1) peningkatan kualitas pelayanan publik; (2) efektifitas program Kalimasada; (3) efektifitas program MBKM di masing-masing Perguruan yang menjadi mitra implementasi program Kalimasada?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prospek keberhasilan kolaborasi antara program “Kalimasada“ dan “MBKM-A, dengan memfokuskan pada : (1) mengetahui respon publik pada wilayah Rukun Tetangga RT yang telah menjadi lokasi diimplementasikannya program Kalimasada; (2) mengetahui peningkatan kontribusi program Kalimasada terhadap pembaharuan data yang ada pada Dispendukcapil Kota Surabaya; (3) mengetahui manfaat yang diterima Perguruan Tinggi dalam kerangka implementasi MBKM (bagi dosen dan mahasiswa) setelah menjalin kolaborasi dalam implementasi program Kalimasada.

Selanjutnya diharapkan rekomendasi dari penelitian ini dapat bermakna-guna bagi upaya: (1) meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang adminduk yang berlangsung pada tiap-tiap RT yang telah menjadi lokasi implmentasi program Kalimasada; (2) mengurangi kesenjangan data kependudukan antara kondisi *de facto* dengan kondisi *de jure* yang dimiliki oleh Dispendukcapil Kota Surabaya; (3) meningkatkan keberhasilan implementasi program MBKM bagi Perguruan Tinggi yang berkolaborasi dalam implementasi program Kalimasada, sehingga Perguruan Tinggi tersebut mendapat manfaat nyata.

2. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini bertumpu pada konsep pelayanan publik, yang mengedepankan 3 pendekatan : (1) pendekatan Kualitas Pelayanan (*Service Quality*), (2) konsep pemberdayaan/pengembangan masyarakat, serta (4) konsep kolaborasi. *Pertama*, konsep kualitas pelayanan: konsep yang mengutamakan kualitas pelayanan (terutama pada pelayanan jasa) merupakan salah satu konsep yang secara klasik telah ditawarkan oleh Parasuraman, dkk, dalam teorinya tentang *Service Quality* [7], dengan berbagai modifikasinya. Pada tahun 2016 Taufiq Rachman dan Darmawan Napitupulu [8] mengadaptasi dan/atau memodifikasi konsep *Service Quality* versi Parasuraman, dkk, ke dalam tabel e-model *Service Quality*, sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Pada era digital ini, terdapat 20 dimensi penting dalam pelayanan jasa berbasis pada kualitas pelayanan yang ditawarkan oleh Taufiq Rachman dan Darmawan Napitupulu dalam Tabel 2 ini.

Tabel 2. Dimensi Model *E-Service Quality*

A	Tampilan web yang menarik (<i>attractive web</i>)
B	Kemampuan web menyediakan layanan yang dijanjikan (<i>reliable service on web</i>)
C	Keamanan dan jaminan perlindungan (<i>secure web</i>)
D	Daya tanggap yang baik (<i>good responsiveness</i>)
E	Ketersediaan bantuan dan dukungan (<i>available support</i>)
F	Ketersediaan informasi yang dapat diakses (<i>available accessible information</i>)
G	Kemudahan menggunakan layanan elektronik (<i>perceived ease of use</i>)
H	Manfaat dari layanan elektronik (<i>perceived usefulness</i>)
I	Kecepatan layanan (<i>speed of service delivery</i>)
J	Ketersediaan layanan berbasis elektronik (<i>e-service availability</i>)
K	Kepedulian penyedia layanan terhadap pengguna (<i>empathy</i>)
L	Jaminan kompensasi ketika layanan bermasalah (<i>compensation of service</i>)
M	Kepercayaan untuk menggunakan layanan online (<i>online trust</i>)
N	Layanan yang berbasis kebutuhan individu (<i>personalization of service</i>)
O	Akses layanan dengan usaha minimal (<i>efficiently service</i>)
P	Keramahan dari penyedia layanan (<i>courtesy</i>)
Q	Ketrampilan dan pengetahuan untuk menyediakan layanan (<i>competency</i>)
R	Persepsi pelanggan terhadap kinerja layanan (<i>performance</i>)
S	Fleksibilitas dalam manajemen pesanan (<i>order management</i>)
T	Inovasi dari layanan berbasis elektronik (<i>innovativeness</i>)

Sumber : Taufiq Rachman dan Darmawan Napitupulu, 2016, [8]

Kedua, konsepsi tentang pemberdayaan/pengembangan masyarakat. Gagasan *community development* (pengembangan/pemberdayaan masyarakat) telah lama muncul praktek pembangunan, sebagai sebuah respon terhadap banyaknya masalah yang dihadapi umat manusia pada akhir abad ke 20 [9]. Beberapa ahli menyatakan, pengembangan masyarakat merupakan penjelmaan dari sebuah format politik baru pada awal abad ke-20. Robert Winsome (2005), misalnya menyatakan bahwa pengembangan masyarakat mulai tumbuh sebagai sebuah gerakan sosial pada tahun 1970-an menyusul mulai bangkitnya kesadaran progresif dari sebagian komunitas internasional untuk memberi perhatian terhadap kebutuhan layanan kesejahteraan bagi orang-orang lemah (*disadvantage*), menerima model kesejahteraan redistributif secara radikal, memberlakukan model kewarganegaraan aktif dan memberi ruang bagi partisipasi warga dalam proses pembangunan [9]. Keberpihakan terhadap nasib orang-orang lemah dilakukan dengan mengubah model gerakan sosial dari kontrol sosial ke metode praktek yang mencoba memberdayakan dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program kemasyarakatan secara kolaboratif partisipatoris. Dari sini, aksi pengembangan masyarakat, perencanaan sosial dan advokasi sosial untuk pertama kalinya menjadi metode praktek *social work* yang khusus dan menyempurnakan model kerja kemasyarakatan tradisional yang pernah ada. Kenny Susan (1994) berpendapat bahwa pengembangan masyarakat dalam konteks ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat lapis bawah dalam mengidentifikasi kebutuhan, mendapatkan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan serta memberdayakan mereka secara bersama-sama. Dengan gerakan ini, masyarakat lapis bawah bisa memiliki kendali secara kuat terhadap kehidupannya sendiri. Orang-orang ikut serta dalam kegiatan pengembangan masyarakat sepanjang waktu, misalnya sebagai pekerja yang dibayar, aktivis masyarakat, pekerja dalam layanan kemanusiaan dan anggota kepanitian masyarakat lokal yang tidak dibayar [10].

Pengembangan masyarakat pada hakekatnya menjadi proses aktualisasi komitmen para aktivis sosial dalam memecahkan masalah kesenjangan atau ketidak-seimbangan antar kelompok dalam masyarakat, termasuk mengatasi masalah kelangkaan sumber daya, kesempatan serta menjauhkan masyarakat dari penderitaan sosial. Setiap program pengembangan masyarakat dirancang untuk mendorong pengembangan sumber daya, ketrampilan dan peluang untuk hidup secara lebih baik bagi rakyat kecil. Setiap upaya mengatasi kesenjangan dan alienasi sosial dilaksanakan oleh para aktivis sosial dengan menggunakan *outreach methods* (kegiatan keorganisasian yang sifatnya melakukan kontak, memberikan pelayanan dan pendampingan kepada anggota masyarakat). Cara ini dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan partisipasi warga dalam berbagai kegiatan masyarakat yang berorientasi untuk memperbaiki kondisi kehidupannya [9].

Ketiga, Konsepsi kolaborasi, model kolaborasi paling populer saat ini adalah kolaborasi Penta Helix, yang menempatkan 5 aktor dalam berkolaborasi mencapai tujuan tertentu, yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat madani, dunia usaha, akademisi Perguruan Tinggi, dan Media Massa.

Tabel 3. Pemangku Kepentingan dalam Kolaborasi Triple Helix, Quadra Helix dan Penta Helix

<i>Triple Helix</i>	<i>Quadra Helix</i>	<i>Penta Helix</i>
Pemerintah Bisnis (Dunia Usaha) Akademisi	Pemerintah Bisnis (Dunia Usaha) Akademisi <i>Civil Society</i>	Pemerintah Bisnis (Dunia Usaha) Akademisi <i>Civil Society</i> Media Massa

Sumbar : Astuti, Retno Sunu. Dkk, 2020, [11]

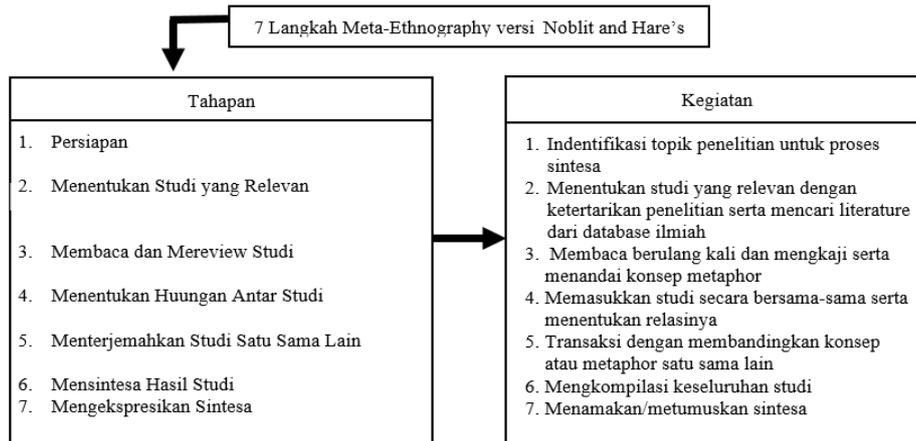
Sebagaimana dikemukakan pada Tabel 3, bahwa kolaborasi *Penta Helix* merupakan bagian tidak terpisahkan dari perkembangan konsep kolaborasi yang mendahului, yakni kolaborasi *Triple Helix* dan *Quadra Helix*. Penggunaan konsepsi kolaborasi dalam penelitian ini disesuaikan dengan produk pelayanan; dalam arti terdapat jenis produk Adminduk yang memerlukan kolaborasi *Triple Helix* saja, ada yang *Quadra Helix* dan ada pula yang *Penta Helix*.

3. Metode

Metoda penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah *systematic review* dengan pendekatan kualitatif yakni *Meta-Ethnography*. *Systematic review* adalah suatu metode penelitian untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan interpretasi terhadap semua hasil penelitian yang relevan terkait pertanyaan penelitian tertentu, topik tertentu, atau fenomena yang menjadi perhatian peneliti (Kitchenham, 2004). Studi individu (*individual study*) merupakan bentuk studi primer (*primary study*), sedangkan *systematic review* adalah studi sekunder (*secondary study*). *Systematic review* merupakan sebuah sintesis dari studi-studi penelitian primer yang menyajikan suatu topik tertentu dengan formulasi pertanyaan yang spesifik dan jelas, metode pencarian yang eksplisit, melibatkan proses telaah kritis dalam pemilihan studi, serta mengo-munikasikan hasil dan implikasinya (Green, 2005). Dengan demikian, *systematic review* akan sangat bermanfaat untuk mengintegrasikan berbagai hasil penelitian yang relevan, sehingga fakta yang disajikan kepada penentu kebijakan menjadi lebih komprehensif dan ber-imbang.

Pendekatan Kualitatif Meta-Ethnography: merupakan analogi dengan metodologi penelitian secara umum terdapat metode kuantitatif dan kualitatif maka dalam *Systematic review* juga terdapat metode kuantitatif dan metode kualitatif (Siswanto, 2010). Metode kuantitatif *Systematic re-view* digunakan untuk mensintesis hasil-hasil penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dalam *systematic review* disebut dengan meta-analisis. Sementara itu metode kualitatif dalam *systematic review* digunakan untuk mensintesis hasil-hasil penelitian yang bersifat deskripsi kualitatif yang disebut dengan meta-sintesis. Secara de-finisi, meta-sintesis adalah teknik melakukan integrasi data untuk mendapatkan teori maupun konsep baru atau tingkatan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh (Perry & Hammond, 2002). Dalam melakukan meta-sintesis terdapat dua pendekatan yaitu meta-agregasi (*meta-aggregation*) dan meta-etnografi (*meta-ethnography*) (Lewin, 2008).

Pada meta-etnografi, pendekatannya adalah interpretatif terhadap hasil penelitian studi primer. Karena pendekatannya adalah interpretatif, maka teknik analisisnya bersifat iteratif (*spiral*). Hasil penelitian studi primer dilakukan pemaknaan ulang (*reinterpretasi*) sehingga menghasilkan pemahaman atau teori baru dengan cara analisis *cross-thematic* secara iteratif. Pendekatan kualitatif meta-etnografi awalnya diperkenalkan oleh Noblit & Hare pada tahun 1988 dan digambarkan sebagai upaya untuk mengembangkan model sintesis pengetahuan yang interpretatif induktif (Noblin & Hare, 1988; Tuquero, 2011). Metode ini mungkin merupakan bentuk eksplisit dari interpretatif review yang paling umum digunakan (Grenwood & Mackenzie, 2010). Pendekatan meta-etnografi dilakukan dengan menggambarkan dan mengintegrasikan pemiiran lintas studi untuk menghasilkan pemahaman dan pandangan yang baru (McDermott, 2004),[8]. Pendekatan Meta-etnografi dalam penelitian ini terdiri dari 7 langkah (Noblit & Hare, 1988) yang ditunjukkan pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Tahapan Meta-Etnography [8]

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dispendukcapil Kota Surabaya merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang melayani masyarakat dalam hal pengurusan Adminduk yang bertugas untuk mencatat, mendaftarkan dan membukukan secara lengkap setiap peristiwa penting penduduk. Sebagai salah satu instansi yang menyelenggarakan pelayanan di bidang Adminduk, Dispendukcapil Kota Surabaya diharapkan dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan bermutu. Sehingga dapat terwujud suatu pelayanan yang efektif dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta kebutuhan bersama.

Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya terdiri dari 31 kecamatan, 154 kelurahan, 1368 Rukun Warga (RW) dan 9118 Rukun Tetangga (RT). Program “Kalimasada” merupakan salah satu program Dispendukcapil Kota Surabaya dalam merintis terciptanya lingkungan/kampung yang tertib Adminduk dengan meningkatkan jumlah masyarakat yang sadar Adminduk (seiring dan melengkapi sejumlah program yang sudah ada). Program ini dilaksanakan dengan menunjuk 62 Ketua RT pada tiap Kecamatan se-Kota Surabaya sekaligus sebagai perintis layanan Adminduk di lingkungan Rukun Tetangga (RT) guna lebih mendekatkan pelayanan Adminduk kepada masyarakat [12]

Dari 62 RT yang sudah mencapai cakupan minimal sebagai model kampung Kalimasada, maka dilanjut untuk membantu RT di wilayah RW di kelurahan nya untuk mereplikasi pola yang sudah berhasil dirintis tersebut. Dalam membangun kampung Kalimasada, RT akan didukung penuh oleh Ning Minduk dan Cak Minduk kelurahan yang sudah dilatih.



Sejalan dengan apa yang tertuang dalam Gambar 2 tersebut, kriteria peserta, fasilitas yang diperoleh peserta, serta daya tarik atau pengalaman yang dapat diperoleh para peserta, sebagai berikut:

Kriteria peserta , meliputi : (1) menjadi mahasiswa perguruan tinggi aktif yang pada tahun ajaran semester genap tahun ajaran 2021/2022 menempuh semester 6 & 8 untuk S1/D4; semester 4 & 6 untuk D3; (2) sehat jasmani dan rohani; (3) mampu berkomunikasi dengan baik dan mampu bekerja dalam kelompok; (4) memiliki inisiatif yang tinggi; (4) telah mendapatkan vaksin Covid-19 sebanyak 2 dosis.

Fasilitas yang diperoleh pada saat kerja praktek: pembimbing yang profesional dan sertifikat yang dapat dikonversi ke dalam mata kuliah di kampus. Adapun daya tarik pengalaman yang berpeluang didapat adalah: (1) program ini berbasis masalah nyata; (2) dapat menjadi *agent of change* secara nyata; (3) menjadi *social control* dan membawa perbaikan pelayanan publik di bidang Adminduk; (4) kegiatan ini merupakan kerjasama multi disiplin ilmu sehingga berpeluang besar dapat menjadi media untuk dapat mengkaji permasalahan secara mendalam; (5) dapat membangun keberagaman sesama teman kerja praktek dengan asal daerah yang bervariasi, sudut pandang penyelesaian solusi yang berbeda, dan keberagaman yang lain; (6) menjadi media implementasi teknik *design of thinking*; (7) merupakan roses kerja praktek yang menyenangkan dan profesional.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Kalimasada maka ditetapkan rincian tugas pelaksana program ini, meliputi : (1) monitoring jalannya program Kalimasada dan mengumpulkan *feedback* dari masyarakat terkait program Kalimasada di lapangan; (2) mendampingi kader dalam menyelesaikan masalah di lapangan; (3) menyusun alur kerjasama Kalimasada dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (UMKM) ; (4) menyusun alur kerjasama peran Ning Minduk dalam pengembangan program Kalimasada.



Gambar 3. Bagan Jenis Pelayanan di Tingkat RT, [13]

Disamping layanan sebagaimana tercantum pada Gambar 3 di atas, yakni untuk mencapai “Biodata Masyarakat Senantiasa Aktual” (Bimasena) dan layanan “Nata Anggota Keluarga Untuk Laporan Akta” (Nakula) akibat mutasi penduduk,[14], maka pada tingkat wilayah RT memberi perhatian pula pada layanan lain yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap urusan Adminduk, misalnya : rekapitulasi data dengan target jempot bola (Jebol) Adminduk, dengan dua sasaran: (1) data warga meninggal belum lapor dan data kelahiran belum lapor. Juga ada Layanan Integrasi Administrasi Kependudukan dengan Pengadilan Agama dan Kementerian Agama, melalui laman sebagaimana tertuang dalam laman <https://aco-eri.disdukcapilsurabaya.id/login>.

Program Kalimasada melibatkan 62 RT yang menjadi lokasi pada tahap rintisan, yang terletak di 62 kelurahan dan 31 kecamatan. Adapun Perguruan Tinggi yang telah berkolaborasi dengan program ini sampai dengan pertengahan bulan Maret 2022 mencapai 17 institusi, yang masing-masing Perguruan Tinggi menerjunkan sekitar 14-20 orang mahasiswa dan 5-7 orang dosen. Aparat Kelurahan yang ikut mendampingi di tiap-tiap RT antara 3-5 orang, adapun aparat kecamatan antara 1-2 orang, serta petugas Dispendukcapil yang mendapat tugas khusus dalam program ini berjumlah 7 orang.

Bentuk program ini dikemas dalam berbagai kegiatan. Yang paling banyak berupa Safari Pelayanan, dilakukan mulai sore-malam hari dalam jadwal yang telah ditentukan. Dalam tiap bulannya di suatu wilayah RT dilaksanakan kegiatan sebanyak 1 kali Safari Pelayanan, dengan rata-rata jumlah kehadiran masyarakat sebesar 8-12 orang, yang melaporkan *update* data sesuai dengan perubahan yang terjadi di

keluarganya. Ini berarti bahwa proyeksi masyarakat yang tiap bulan melakukan *update* data antara 496-an orang.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan : Bahwa prospek kolaborasi program “Kalimasada” dengan MPKM-A amat baik, memiliki peluang relatif tinggi dalam : (1) meningkatkan komitmen dan partisipasi publik dalam ikut memberikan masukan tentang perubahan data kependudukan; (2) Meningkatkan pembaharuan data yang dimiliki oleh Dispendukcapil Kota Surabaya, sehingga mengurangi kesenjangan antara kondisi data secara *de facto* dan *de jure*; (3) Perguruan Tinggi yang bersedia menjalin kolaborasi dalam program Kalimasada selalu bertambah, dan bahwa program ini diakui telah membantu mencapai efektifitas program MBKM di kampus mereka, yang memiliki manfaat bagi peningkatan prestasi Perguruan Tinggi secara kelembagaan, prestasi dosen dan para mahasiswa yang ikut serta dalam kolaborasi ini.

Saran yang diajukan sebagai penutup laporan ini adalah : (1) pada masa mendatang, Dispendukcapil Kota Surabaya perlu menambah secara berkala jumlah wilayah RT yang dijadikan lokasi implementasi program Kalimasada; (2) Dispendukcapil perlu meng-agendakan kegiatan sosialisasi program Kalimasada ini secara terus-menerus, terhadap para pemangku kepentingan yang relevan; (3) Dispendukcapil, Perguruan Tinggi, komunitas masyarakat, pelaku bisnis dan media massa perlu meng-optimumkan perannya dalam format kolaborasi *Penta Helix*, agar data Adminkod yang sudah tertata dengan baik dapat memberikan nilai tambah yang riil kepada penduduk kota Surabaya yang memerlukannya, misalnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan lain-lain sesuai kebutuhan penduduk yang beragam, sehingga *update* data Adminkod melalui program Kalimasada ini juga sekaligus bernilai pemberdayaan masyarakat.

Referensi

- [1] Indahri, Yulia. Tantanga Pengelolaan Kependudukan Kota Surabaya. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol.8 No. 1. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/125>. Diakses 23-03-2022.
- [2] Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur. Jumlah penduduk Jawa Timur Hasil Sensus Penduduk 2020 sebesar 40,67 Juta Orang. <https://jatim.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1224/jumlah-penduduk-jawa-timur-hasil-sensus-penduduk-2020--sp2020--sebesar-40-67-juta-orang.html>. Diakses 23003-2022.
- [3] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Dalam Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. Banyaknya Penduduk Kota Surabaya menurut Jenis Kelamin 1969-2020. Data Update 13 Desember 2021. <https://surabayakota.bps.go.id/statictable/2021/12/13/906/banyaknya-penduduk-kota-surabaya-menurut-jenis-kelamin-tahun-1969--2020.html>
- [4] Badan Pusat Statistik. Kota Surabaya Dalam Angka 2020, dalam Ginanjar. Surabaya Raya, Jumlah Penduduk Surabaya Capai 2.874.314 Jiwa. 2021. Surabaya. <https://www.jawapos.com/surabaya/02/02/2021/jumlah-penduduk-surabaya-capai-2-874-314-jiwa/>. Diakses 24-03-2022.
- [5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- [6] Saffah, A. E. & Prathama, A. Inovasi e-Lampid Dalam Peningkatan Kemudahan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, Public Administration Journal. Vo.2.(3). halaman 111-123.
- [7] Parasuraman, Zeithaml, V.A., & Malhotra, A., E-S-QUAL: a multiple-item scale for assessing electronic service quality”, Journal of Service Research, Vol. 7, No. 3, pp. 213-234. 2005.
- [8] Rachman1, Taufiq dan Napitupulu, Darmawan. Model Kualitas e-Service dengan Pendekatan Meta-Etnografi. Jurnal IPTEK-KOM, Vol. 18 No. 2, Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Desember 2016: 81-97.
- [9] Zubaedi. Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktek, Kencana Predana Media Grup. Jakarta,. 2013.
- [10] Susan, Kenny. Developing Communities for the Future: Community Development in Australia - 2nd. Thomson Publishing, 1999.
- [11] Astuti, Retno Sunu. Warsono, Hardi. Rachim, Abd. Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik. Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press. Semarang. 2020.
- [12] Dispendukcapil Kota Surabaya. Bahan Sosialisasi program Kalimasada, Surabaya, 2021.
- [13] Dispendukcapil Kota Surabaya. Panduan Pelaksanaan Kerja Praktek Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Administrasi Kependudukan (MBKM-A). Surabaya, 2021
- [14] Dispendukcapil Kota Surabaya. Penduduk Keluar Kota menurut Jenis Kelamin per Kecamatan. 2020. dalam <https://surabayakota.bps.go.id/statictable/2021/12/16/920/banyaknya-penduduk-pindah-keluar-kota-menurut-jenis-kelamin-per-kecamatan-2020.html>